

**PROFIL PEJABAT DAN LHKPN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SABANG**



NAMA	: ELLY ROSNIDAR
JABATAN	: KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
PENDIDIKAN	: STRATA-1

Informasi terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dapat di lihat pada website:
www.disdukcapil.sabangkota.go.id



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELLY ROSNIDAR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 835640

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1081 m2/90 m2 di KOTA SABANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2968 m2/100 m2 di KOTA SABANG ,
WARISAN Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 752 m2/80 m2 di KOTA SABANG ,
HADIAH Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 35.500.000

1. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 13.500.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.815.080

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.826.315.080

III. HUTANG Rp. 241.007.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.585.308.080

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.